



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah & Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI MANado Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado di masa yang akan datang.

Manado, 30 November 2023

Kepala



Made Nur Hesti Juniartha  
NIP 197906232000021001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	[hal]
DAFTAR ISI	[hal]
IKHTISAR EKSEKUTIF	[hal]
BAB I PENDAHULUAN	[hal]
A. Latar Belakang	[hal]
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	[hal]
C. Maksud dan Tujuan	[hal]
D. Aspek Strategis	[hal]
E. Isu Strategis	[hal]
F. Landasan Hukum	[hal]
G. Sistematika Laporan	[hal]
BAB II PERENCANAAN KINERJA	[hal]
A. Rencana Strategis	[hal]
B. Perjanjian Kinerja	[hal]
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	[hal]
A. Capaian Kinerja [ <i>Satuan Kerja</i> ]	[hal]
B. Realisasi Anggaran	[hal]
C. Capaian Kinerja Anggaran	[hal]
D. Capaian Kinerja Lainnya	[hal]
BAB IV PENUTUP	[hal]
A. Kesimpulan	[hal]
B. Saran	[hal]
LAMPIRAN	[hal]

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 3,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,94 dari target 3,25 atau 121%. Capaian ini tidak mengalami perubahan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,94
2. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,74 dari target 3,13 atau 119%. Capaian ini mengalami *peningkatan* dari capaian tahun 2022 sebesar 3,66 atau mengalami *peningkatan* sebesar 102%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Internal di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,88 dari target 3,13 atau 123%. Capaian ini konsisten dari capaian tahun 2022 sebesar 3,88 indeks.
4. Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2023 adalah sebesar **[Rp 10.884.253.233]** atau **[87,64%]** dari total anggaran Rp12.600.591.000 Realisasi ini mengalami *[peningkatan/penurunan]* dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp. 11.848.790.494,- atau 96,21 % dari total anggaran Rp.12.315.126.000,- Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2023 sebesar Rp.19,433,791,762,- atau 302% dari total anggaran Rp.6.425.350.000,-

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

1. BIRMAN (Bot Informasi dan Pengaduan);
2. PANIKI JO (Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Jemput Bola);
3. TORANG SETING (Servis Exelent Tanpa Istirahat Siang);
4. LAPOR BOS (Layanan Paspor Prioritas Bagi Disabilitas Orang Sakit Dan Lansia)

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan antara lain :

1. Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam Rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke 75 Tahun 2023;
2. Satker Terbaik II Kategori Pengisian LHKPN/ LHKASN (SERAYA) Unit Pelaksana Teknis dengan Pegawai Lebih dari sama dengan 50 orang;
3. Peringkat III Satker Pengelola Pagu dari 12 s.d. 25 Miliar Rupiah Semester I Tahun 2023

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja. Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Jalan 17 Agustus, Kota Manado *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 2 Kota dan 4 Kabupaten, yaitu :

1. Kota Manado

2. Kota Tomohon
3. Kabupaten Minahasa
4. Kabupaten Minahasa Selatan
5. Kabupaten Minahasa Utara
6. Kabupaten Minahasa Tenggara

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada tahun 1954 semula ditetapkan sebagai Kantor Imigrasi Cabang Makassar, sampai dengan tanggal 23 Oktober 1980 dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Ujung Pandang. Pada tanggal 24 Oktober 1980 ditingkatkan menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dengan wilayah kerja Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dengan ditetapkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Sulawesi Utara dan Tengah di Manado pada tahun 1982 berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan *[SK Pembentukan Satker]*. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Menyusun rencana dan program di bidang keimigrasian
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara serta rumah tangga; dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

<b>1. Sub Bagian Tata Usaha</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;</li><li>2. pelaksanaan dan pengendalian internal;</li><li>3. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan</li><li>4. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.</li></ol>

<p>pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.</p> <p>a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.</p> <p>b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.</p> <p>c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.</p>	
--	--

<b>2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas.</p> <p>b. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;</li> <li>2. pelayanan paspor;</li> <li>3. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;</li> <li>4. pelayanan pas lintas batas;</li> <li>5. pemeriksaan dokumen keimigrasian;</li> <li>6. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.</li> </ol>

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
---	--

<b>3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.</p> <p>b. Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;</li> <li>2. pelayanan izin tinggal;</li> <li>3. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;</li> <li>4. pelayanan izin masuk kembali;</li> <li>5. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;</li> <li>6. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan</li> <li>7. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.</li> </ol>

<b>4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;</li> <li>2. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;</li> <li>3. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;</li> </ol>

<p>rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.</p> <p>b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.</p>	<p>4. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan</p> <p>5. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.</p>
---	---

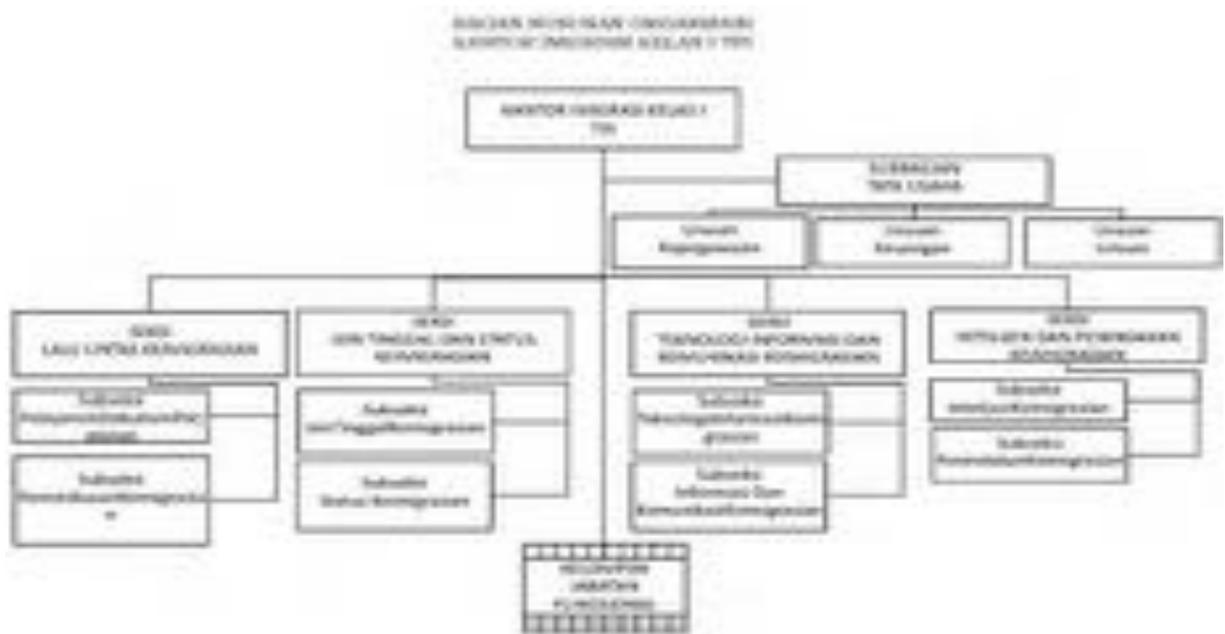
<b>5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
<p>Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian</p> <p>b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif</p>	<p>1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;</p> <p>2. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;</p> <p>3. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;</p> <p>4. penyajian informasi produk intelijen;</p> <p>5. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;</p> <p>6. penyidikan tindak pidana keimigrasian;</p> <p>7. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan</p> <p>8. pelaksanaan pemulangan orang asing.</p>

keimigrasian, dan pemulangan orang asing.	
---	--

Kelima seksi tersebut diatas dibagi menjadi 11 Sub Seksi/ urusan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 3 urusan, yaitu:
  - a. Urusan Kepegawaian;
  - b. Urusan Keuangan, dan;
  - c. Urusan Umum;
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
  - a. Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan;
  - b. Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian;
3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
  - a. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
  - b. Sub Seksi Status Keimigrasian;
4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
  - a. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian;
  - b. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
  - a. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, dan;
  - b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 64 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 29 orang Jabatan Fungsional, dan 19 orang Fungsional Umum.

### 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Pelaksana Teknis	Pria	Wanita	Jumlah
Kanim Kelas I TPI Manado	42	22	64

### 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

Golongan															
I				II				III				IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
-	-	-	-	15	-	-	6	7	19	11	3	3	-	-	-

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri [nomor dan tanggal surat] Perihal Wilayah Kerja [satuan kerja] meliputi:

1. *Kota Manado*
2. *Kota Tomohon*
3. *Kabupaten Minahasa*
4. Kabupaten Minahasa Utara
5. Kabupaten Minahasa Selatan Tenggara



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado.



Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado juga bekerja sama dengan pemerintah setempat dengan memberikan layanan paspor pada Mall Pelayanan Publik Kota Manado dan Mall Pelayanan Publik Kota Tomohon

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi *[satuan kerja]* untuk meningkatnya kinerjanya.

### **D. Aspek Strategis**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi

Utara dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
  - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
  - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
  - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;

- e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi [*sebutkan inovasi*].

## **E. Isu Strategis**

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia
  - a. Terdapat 2 jabatan struktural Eselon V yang masih kosong yaitu Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan dan Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian;
  - b. Kurangnya jabatan fungsional pranata computer dan arsiparis serta pelaksana
2. Sarana dan Prasarana
  - a. Terdapat dua rumah negara yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berstatus pinjam pakai, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah mengirimkan surat permohonan untuk Hibah tanah tersebut namun belum ada tindak lanjut;
  - b. Ruang Detensi belum memadai

## **F. Landasan Hukum**

Dalam melakukan penyusunan LKjIP *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

## **G. Sistematika Laporan**

Sistematika Laporan Kinerja *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

### **2. BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

### **3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

#### **a. Capaian Kerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado;

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

#### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 5. LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja tahun berjalan;

Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;

Penghargaan;

Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan

diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepr

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan

2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, *[satuan kerja]* menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN dan *employer branding* bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-Nilai Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat <input type="checkbox"/> Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan <input type="checkbox"/> Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi <input type="checkbox"/> Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien <input type="checkbox"/> Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah <input type="checkbox"/> Membantu orang lain belajar <input type="checkbox"/> Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya <input type="checkbox"/> Suka menolong orang lain <input type="checkbox"/> Membangun lingkungan kerja yang kondusif

5.	Loyal	:	Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah  Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara  Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan <input type="checkbox"/> Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas <input type="checkbox"/> Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi <input type="checkbox"/> Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah <input type="checkbox"/> Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali

pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

dan Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Mewujudkan pelayanan keimigrasian yang prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak memiliki dokumen sesuai prosedur;

4. Mewujudkan ASN yang berkompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi;

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMANDO DENGAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI  
UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks) 3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<i>[Rp 3.417.635.000]</i>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	<i>[Rp 3.417.635.000]</i>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<i>[Rp 9.001.907.000]</i>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	<i>[Rp 9.001.907.000]</i>
Total	<i>[Rp 12.419.542.000]</i>

Pelaksanaan program dan kegiatan pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar [Rp12.419.542.000]. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar [Rp3.857.775.000], belanja barang sebesar [Rp6.258.452.000], dan belanja modal sebesar [Rp2.303.315.000]. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar [Rp5.612.301.000] dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar [Rp6.807.241.000].

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado**

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2(dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2023 diimplemenasikan melalui Sararan Kegiatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di dan

Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,94	121%
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,74	119%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,88	123%
Anggaran		Rp12.419.542.000	Rp12.083.890.791	97,30%

### 1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

**Sasaran 1:** Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

*Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah*

Pengukuran Kinerja:

100%

---

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	3,92	3,91	3,91	3,91	3,91	3,92	3,91	3,92	3,91	3,92	3,92	3,95
Persyaratan	3,92	3,91	3,91	3,91	3,91	3,92	3,91	3,91	3,91	3,91	3,02	3,96
Prosedur/ Alur	3,95	3,91	3,91	3,91	3,91	3,92	3,91	3,91	3,92	3,91	3,92	3,95
Waktu Penyelesaian	3,9	3,91	3,9	3,91	3,91	3,92	3,91	3,91	3,91	3,9	3,92	3,94
Tarif/ Biaya	3,93	3,91	3,9	3,91	3,91	3,92	3,91	3,91	3,91	3,91	3,92	3,95
Sarana/ Prasarana	3,9	3,91	3,9	3,9	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,92	3,91
Respon	3,88	3,91	3,9	3,91	3,91	3,92	3,91	3,91	3,91	2,91	3,92	3,9
Konsultasi/ Pengaduan	3,92	3,91	3,9	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,92	3,93
Nilai SKM	3,96	3,99	3,99	3,84	3,89	3,92	3,97	3,98	3,93	3,96	3,99	3,94
Responden	36	40	80	70	66	74	47	49	51	50	61	63

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum_{i=1}^{12} X_i}{Y}$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,94.

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,92
Persyaratan	3,84
Prosedur/ Alur	3,92
Waktu Penyelesaian	3,91
Tarif/ Biaya	3,92
Sarana/ Prasarana	3,91
Respon	3,84
Konsultasi/ Pengaduan	3,91
<b>Nilai SKM</b>	<b>3,94</b>
<b>Responden</b>	<b>687</b>

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado adalah 3,94 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 121%.

Capaian IKM:

100%

$$= \frac{1}{3,2} \cdot 100\% =$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1-4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 □ 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 □ 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 □ 3.532	B	BAIK
4	3.5324 □ 4.00	A	SANGAT BAIK

*Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017*

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado berada dalam kategori *Sangat Baik*.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,94 dan 2021 sebesar 3,91, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 konsisten mencapai target yang sudah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah konsisten.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,91	124%	3,20	3,94	123%	3,25	3,94	121%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,94 indeks atau nilai capaian sebesar 121%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{3,94}{3,30} \times 100\% = 119,39\%$$

$$\frac{3,94}{3,30} \times 100\% =$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar 3,96, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado lebih kecil 0,02 poin atau capaiannya 99% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado lebih besar 0,23 poin atau capaiannya 106% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara	3.96	3,94	99%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3.71	3,94	106%

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. BIRMAN (Bot Informasi dan Pengaduan);
2. PANIKI JO (Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Jemput Bola);
3. TORANG SETING (Servis Exelent Tanpa Istirahat Siang);
4. LAPOR BOS (Layanan Paspur Prioritas Bagi Disabilitas Orang Sakit Dan Lansia)
- 5.

Unsur Layanan	Nilai
<b>Informasi</b>	3,91
<b>Persyaratan</b>	3,82
<b>Prosedur/ Alur</b>	3,92
<b>Waktu Penyelesaian</b>	3,91
<b>Tarif/ Biaya</b>	3,91
<b>Sarana/ Prasarana</b>	3,91
<b>Respon</b>	3,83
<b>Konsultasi/ Pengaduan</b>	3,91

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur *Persyaratan dan Respon* memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami Peningkatan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat dua unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Persyaratan
2. Respon;

## **2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah**

**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

*Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah*

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah 8 responden. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini 6 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,85
2	Penyidikan	10	3,20

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
3	TAK	10	3,85
4	Pengawasan	20	3,83
5	Pengaduan	20	3,70
6	Pencegahan	20	3,70

*Unsur Survei Pihak Internal*

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,73
2	Penyidikan dan TAK	20	3,60
3	Pengawasan	20	3,93
4	Pengaduan	20	3,60
5	Pencegahan	20	3,87

*Unsur Survei Pihak Eksternal*

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 8 (*delapan*) responden *Internal* dan 6 (*enam*) responden *eksternal*; dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sebesar 3,73 untuk *internal* dan 3,75 untuk *eksternal*.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai IPK} = \frac{(\dots) + (\dots)}{\dots}$$

$$= \frac{\dots + \dots}{\dots}$$

=

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* sebesar 3,74, Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 119%.

Capaian IPK:

$$= \frac{3,74}{3,13} \times 100\% = 119\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,66 dan 2021 sebesar 3,92, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan di tahun 2022 mengalami peningkatan di tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* masih belum stabil dalam kenaikan.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,92	79%	3,12	3,66	85%	3,13	3,74	84%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 *sudah* terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,74 indeks atau nilai capaian sebesar [84%].

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{3,74}{3,14} \times 100\% = 119,11\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar 3,76 maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* lebih kecil 0,02 poin atau capaiannya 99% dibanding dengan *Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara*. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* lebih besar 0,03 poin atau capaiannya 113% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK Kantor Imigrasi Manado	Capaian (%)
----	-----------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------

1	Divisi Keimigrasian Wilayah Sulut	3,76	3,74	99%
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara			
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,74	113%

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, seperti:

1. Pelaksanaan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing pada 4 Kabupaten, 2 Kota dan 2 Kecamatan;
2. Pelaksanaan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing;
3. Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian;
4. Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;
5. Projusticia.

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur Penyidikan dan Pengaduan memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. *Meningkatkan kemampuan dalam hal Penyidikan*
2. *Memperbaiki sistem pengaduan*

### 3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

**Sasaran 2:** Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

*Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah*

Pengukuran Kinerja:

100%

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
<b>A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi</b>												
Transparansi	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,92
Menerima Imbalan	3,88	3,88	3,91	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,9
Perlakuan yang sama	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,92

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Prosedur	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,9
Privasi Pelapor	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,88	3,89	3,9
Proses Pelanggaran	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,88	3,88	3,91
Pencegahan Korupsi	3,88	3,87	3,88	3,88	3,89	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,92
<b>B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM</b>												
Penerimaan Pegawai	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,88	3,89	3,91
Penempatan	3,88	3,87	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,92
Promosi Jabatan	3,88	3,87	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,88	3,88	3,88	3,9
Pengembang an Kompetensi	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,92
Kenaikan Pangkat	3,89	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,9	3,89	3,89	3,89	3,88
Gaji	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,9	3,89	3,9	3,9	3,89	3,9	3,93
Presensi Pegawai	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,88	3,88	3,89
<b>C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran</b>												
Perjalanan Dinas	3,88	3,87	3,87	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,91
PBJ	3,88	3,87	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89
Honorarium	3,87	3,87	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,91

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Bukti Transaksi	3,88	3,87	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,9
<b>D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma</b>												
Tanggung jawab	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,92
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,88	3,89	3,89
Hukuman Pekerja Tidak Sesuai Aturan	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,88	3,89	3,92
Kode Etik	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,88	3,89	3,89
Nilai Integritas	3,88	3,91	3,92	3,92	3,9	3,89	3,9	3,92	3,92	3,9	3,95	3,91
Responden	83	86	86	86	86	83	84	83	83	83	78	84

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum_{i=1}^{12} X_i}{Y} = 1$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar [3,18 (contoh)] dengan perhitungan sebagai berikut:

12

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{((3,2 \times 145) + (3,15 \times 123) + (3,3 \times 176) + (3,1 \times 164) + (3,12 \times 153) + (3,14 \times 145) + (3,15 \times 123) + (3,3 \times 176) + (3,1 \times 164) + (3,12 \times 153))}{145 + 123 + 176 + 164 + 153} \\ &= \frac{6390,21}{2010} \\ &= 3,18 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3,89
Menerima Imbalan	3,89
Perlakuan yang sama	3,88
Prosedur	3,88
Privasi Pelapor	3,88
Proses Pelanggaran	3,88
Pencegahan Korupsi	3,88
Penerimaan Pegawai	3,88
Penempatan	3,88
Promosi Jabatan	3,88
Pengembangan Kompetensi	3,88

Unsur Layanan	Nilai
Kenaikan Pangkat	3,88
Gaji	3,88
Presensi Pegawai	3,89
Perjalanan Dinas	3,88
PBJ	3,87
Honorarium	3,87
Bukti Transaksi	3,87
Tanggung jawab	3,88
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,88
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,88
Kode Etik	3,88
<b>Nilai Indeks Integritas Organisasi</b>	<b>3,88</b>
<b>Responden</b>	<b>1005</b>

Hasil Indeks Integritas Organisasi [*satuan kerja*] yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada [*satuan kerja*] yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$= \frac{(\quad)}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal [*satuan kerja*] adalah sebesar 3,88 dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar [121%].

Capaian IKI:

100%

$$= \frac{3,13}{3,13} \times 100\% =$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,88 dan 2021 sebesar 3,88, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,88 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah konsisten.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,83	123%	3,12	3,88	124%	3,13	3,88	123%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,88 indeks atau nilai capaian sebesar 123%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{2023}{2024} \times 100\%$$

$\frac{3,88}{3,14} \times 100\% = [123\%]$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar *[nilai IKI kanwil]*, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado lebih *[besar/kecil]* poin atau capaiannya jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara.

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI Kantor Imigrasi Kelas I TPI MAnado	Capaian (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	3,91	3,88	99%

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. *Sosialisasi Kode Etik dan Perilaku serta Aturan Disiplin ASN secara berkala*
2. *Pemberian Reward dan Punishment;*

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3,89

Unsur Layanan	Nilai
Menerima Imbalan	3,89
Perlakuan yang sama	3,88
Prosedur	3,88
Privasi Pelapor	3,88
Proses Pelanggaran	3,88
Pencegahan Korupsi	3,88
Penerimaan Pegawai	3,88
Penempatan	3,88
Promosi Jabatan	3,88
Pengembangan Kompetensi	3,88
Kenaikan Pangkat	3,88
Gaji	3,88
Presensi Pegawai	3,89
Perjalanan Dinas	3,88
PBJ	3,87
Honorarium	3,87
Bukti Transaksi	3,87
Tanggung jawab	3,88
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,88
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,88

Unsur Layanan	Nilai
Kode Etik	3,88

Dengan memiliki nilai Indeks Kepuasan Interanal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian semuanya telah melampaui target.

## B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

*-Realisasi Anggaran Tahun 2023-*

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<i>Rp 3.417.635.000</i>	<i>Rp 3.311.298.549</i>	96,89%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	<i>Rp 3.417.635.000</i>	<i>Rp 3.311.298.549</i>	96,89%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<i>Rp 9.001.907.000</i>	<i>Rp 8.772.592.248</i>	97,45%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	<i>Rp 9.001.907.000</i>	<i>Rp 8.772.592.248</i>	97,45%
<b>Total</b>	<i>Rp 12.419.542.000</i>	<i>Rp 12.083.890.791</i>	97,30%

*-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-*

<b>Kinerja Keuangan</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>
Total Pagu	<i>Rp 10.245.525.000</i>	<i>Rp 12.315.126.000</i>	<i>Rp 12.419.542.000</i>
Realisasi	<i>Rp 8.747.929.452</i>	<i>Rp 11.848.790.494</i>	<i>Rp 12.083.890.791</i>
<b>Capaian</b>	85,38%	96,21%	97,30%

*-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-*

<b>BELANJA</b>	<b>2021</b>			<b>2022</b>		
	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Belanja Pegawai	<i>Rp 3.940.377.000</i>	<i>Rp 3.932.481.410</i>	99,80%	<i>Rp 4.134.785.000</i>	<i>Rp 4.118.482.314</i>	99,61%

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	Rp 5.568.148.000	Rp 4.120.568.042	74 %	Rp 6.179.949.000	Rp 5.823.330.966	94,23%
Belanja Modal	Rp 737.000.000	Rp 694.880.000	94,28%	Rp 2.000.392.000	Rp 1.906.977.214	95,33%
<b>JUMLAH</b>	<b>RP 10.245.525.000</b>	<b>Rp 8.747.929.452</b>	<b>85,38%</b>	<b>Rp 12.315.126.000</b>	<b>Rp 11.848.790.494</b>	<b>96,21%</b>

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 3.857.775.000	Rp 3.780.369.809	97,99%
Belanja Barang	Rp 6.258.452.000	Rp 6.097.020.698	97,42%
Belanja Modal	Rp 2.303.315.000	Rp 2.206.500.284	95,80%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 12.419.542.000</b>	<b>Rp 12.083.890.791</b>	<b>97,30%</b>

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Keimigrasian sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. [dst].

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* tahun 2023 sebesar Rp 6.425.350.000. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2023:

No	Tahun Anggaran	Realisasi
1	2021	Rp 89.396.722
2	2022	Rp 9.762.507.615
3	2023	Rp 19.635.591.762

### C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk *[satuan kerja]* wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	90,09	85,38	74,32	100	14,65	86,64
2	2022	95,77	96,42	87,65	100	17,71	94,29
3	2023	98,77	97,3	94,68	100	20	98,77

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada tahun 2023, termasuk dalam kategori Sangat Baik



Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;

- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

No	Tahun Anggaran	Nilai IKPA
1	2021	96,41
2	2022	97,27
3	2023	95,55

The screenshot shows the 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' (Budget Execution Indicator) for 2021. It displays a table with various performance metrics and their corresponding values.

IKPA 2021

The screenshot shows the 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' (Budget Execution Indicator) for 2022. It displays a table with various performance metrics and their corresponding values.

IKPA 2022

The screenshot shows the 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' (Budget Execution Indicator) for 2023. It displays a table with various performance metrics and their corresponding values.

KID	KODE EPPN	KODE BA	KODE SAJEN	URAIAN DETAIL	KEPENGANTARAN	KUALITAS PELAYANAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAYANAN ANGGARAN			NILAI TITIK	KORUS/BOBOT	NILAI AKHIR NILAI PENILAIAN/BOBOT		
						REVISI PERNYATAAN	SELISIR	PERSEPSI ANGGARAN	KEJASA KONTRAKTUAL	PERYUTCHAN TAGIHAN	PENGOLAHAN UP DAN TUP				DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT
1	040	013	400010	SAKTOR KHARAK KLASIFIKASI MANAJEMEN	Nilai	100,00	0,00	40,00	90,00	100,00	20,00	100,00	100,00	95,55	100%	95,55
					Bobot	10	10	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	100,00	0,00	18,00	8,00	10,00	8,00	25,00				
					Nilai Pokok	51,50			54,00			100,00				

IKPA 2023

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* adalah sebesar 95,55 Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* dikategorikan *Sangat Baik* karena berada pada *range* nilai

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraih penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado di tahun 2023:

##### 1. Pengisian E-Performance



Berdasarkan data E-Performance Kemenkumham Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado memiliki 3 Indikator yang semuanya telah tercapai di setiap Triwulan

##### 2. E-Monev Bappenas



Berdasarkan data E-Monev Bappenas Kantor Imigrasi Kelas I TPI telah melakukan penginputan dengan Data Realisasi Komponen dan Rincian Output 100% pada setiap bulannya.

3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

*[penjelasan terkait pencapaian Target Kinerja Kantor Wilayah]*

4. Capaian Output Lainnya

*[data-data statistik lain yang berhubungan dengan tusi keimigrasian masing-masing satuan kerja seperti misalnya data perlintasan, penerbitan paspor, data deteni pada rudenim, dsb tergantung karakteristik satuan kerja]*

5. Penghargaan

NO	NAMA PENGHARGAAN	TANGGAL	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	Satker Terbaik II Kategori Pengisian LHKPN/ LHKASN (SERAYA) Unit Pelaksana Teknis dengan Pegawai Lebih dari sama dengan 50 orang	26 Maret 2023	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Ronald Lumbuun)
2	Peringkat III Satker Pengelola Pagu dari 12 s.d. 25 Miliar Rupiah Semester I Tahun 2023	21 September 2023	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
3	Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam Rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke 75 Tahun 2023	6 November 2023	An. Menteri Hukum dan HAM Direktur Jenderal HAM (Dr.Dhahana Putra)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:

1.

fungsi keimigrasian di  
dengan capaian:

- i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar *[capaian dalam persentase] [tanpa*
- ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar *[capaian dalam persentase] [tanpa ada catatan/dengan*  
*ca*

2.

Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian

sebesar [capaian dalam persentase] [tanpa ada catatan/dengan catatan

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar [Rp 10.884.253.233] atau [87,64%] dari total anggaran sebesar [Rp 12.419.542.000];
3. Realisasi PNBPN tahun 2023 adalah sebesar Rp 19.635.591.762 atau 302 % dari target sebesar Rp 6.425.350.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado adalah:
  - a. Sumber Daya Manusia
    - 1) Terdapat 2 jabatan struktural Eselon V yang masih kosong yaitu Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan dan Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian;
    - 2) Kurangnya jabatan fungsional pranata computer dan arsiparis serta pelaksana
  - b. Sarana dan Prasarana
    - 1) Terdapat dua rumah negara yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berstatus pinjam pakai, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah mengirimkan surat permohonan untuk Hibah tanah tersebut namun belum ada tindak lanjut;
    - 2) Ruang Detensi belum memadai
2. Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam Rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke 75 Tahun 2023
3. Satker Terbaik II Kategori Pengisian LHKPN/ LHKASN (SERAYA) Unit Pelaksana Teknis dengan Pegawai Lebih dari sama dengan 50 orang;
4. Peringkat III Satker Pengelola Pagu dari 12 s.d. 25 Miliar Rupiah Semester I Tahun 2023

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja.

Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Besar harapan *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya [*satuan kerja*] untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

## LAMPIRAN



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN MELAYAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT AMBANGSIKHA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nade Nur Hapsi Juswatha**  
Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Puskesmas I EPR Marudu**

**Ketertarikan tentang Pihak Pertama**

Nama : **Ronald Lubiana**  
Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Pemerintahan Kabupaten dan DPRD Kabupaten Marudu**

**Dalam rangka pihak pertama, ketertarikan tentang Pihak Kedua**

Pihak pertama kami akan melakukan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan kebijakan ini. Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut kami akan melakukan upaya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk akan melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan target dan kebijakan ini dan mengorganisir tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian target/kegiatan dan waktu.

Marudu, 8 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Marudu

Ronald Lubiana  
NIP. 197009011980011001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Kabupaten I EPR Marudu

Nade Nur Hapsi Juswatha  
NIP. 197802011990011001

**PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTON BARRAS KELAS I TPI BARRAS DENYAR**  
**KANTON WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan pelayanan publik di wilayah hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Bidang Hukum	1,25 (sangat baik)
2.	Menyempurnakan tata kelola keuangan melalui transparansi dan pertanggungjawaban	Indeks Pengawasan Keuangan	1,00 (sangat baik)
3.	Mendukung kinerja kerja yang bermutu melalui peningkatan yang berkelanjutan, efektif dan efisien	Indeks Pelaksanaan Pekerjaan	80
		Indeks Akuntabilitas Kinerja	80

No.	Elemen Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat	1,25 (sangat baik)
2.	Meningkatkan Kualitas Keuangan melalui Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban	Indeks Pengawasan Keuangan	1,00 (sangat baik)
3.	Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kantor/Kantor Wakil dan Unit Kerja Mendukung Kualitas Layanan Daerah (K)	Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kantor/Program	80 Layanan

No.	Isu/tema Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Memperhalus masalah pemenuhan ruang dan daya tampung di Alayeh	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemenuhan di Alayeh 2. Indeks Perencanaan Ketampungan di Alayeh	1,25 (rubrik) 1,00 (rubrik)
2.	Memperhalus Layanan Dukungan Manajemen dan Keuangan Untuk Alayeh di Alayeh	1. Indeks Kepuasan Internal di Alayeh	1,00 (rubrik)

Kegiatan	Anggaran
Program Pemenuhan dan Perawatan Akut	Rp. 2.407.434.000,-
Pemenuhan Ruang Pemeliharaan, Pelayanan dan Tanggapan Akut Ketampungan di Alayeh	Rp. 2.407.434.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.912.141.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknik untuk UPT Alayeh	Rp. 4.912.141.000,-

Maret 20 Januari 2021

**Fitriah Khatun,**  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara



Fitriah Khatun  
NIP. 1970061 20031 1 001

**Fitriah Purwati,**  
Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Wotu



Fitriah Purwati  
NIP. 1970061 20031 1 001



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH KESEHATAN I TPI MALANG DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMUDAHIAN**

Demi upaya mendukung kegiatan penelitian yang akan, bersama dan  
dibantu serta berkoordinasi pada saat, kegiatan yang meliputi:

- Nama : **Inda Nur Fauziah**
- Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Kesehatan I TPI Malang**

tersebut akan melakukan kegiatan teknis yang berkaitan dengan kegiatan ini,  
dan juga sebagai kepala kantor wilayah kesehatan regional yang akan melakukan dan  
melakukan penelitian.

Pelaksanaan dan kegiatan penelitian kegiatan teknis tersebut meliputi kegiatan yang  
sifat:

Malang, Januari 2023

**Kepala Kantor Wilayah Kesehatan I TPI Malang**

**Inda Nur Fauziah**  
Kep. Wilayah Kesehatan I TPI



PERJUKJAN KEMERJA TAHUN 2021  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
KANTOR WILAYAH KELAS I TPB BANADO

Dalam rangka meningkatkan kemandirian pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berminat sangat diundang untuk

Nama : Fajar Widada A.Md.M. S.H  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Winda Nur Fiqi Junaidia, S.H., M.A.P  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kelas I TPB Banado

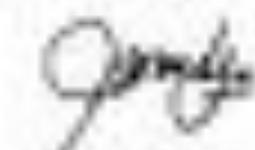
Selaku dalam pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama hereby telah mengajukan target kinerja yang selaras/runtut sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang diharapkan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kefasihan dan tinggapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan evaluasi yang diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan menanggapi tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan/penyempurnaan dan lain-lain

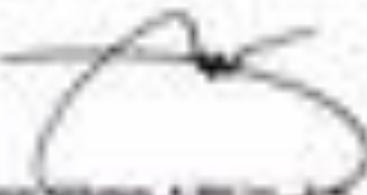
Banado, 17 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kelas I TPB Banado



Winda Nur Fiqi Junaidia, S.H., M.A.P  
NIP. 19820301199001001

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Fajar Widada A.Md.M. S.H  
NIP. 19820301199001001

**PERJANJIAN KERJA SAMA TAHUN 2023**  
**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA (BUDAS)**  
**KEPALA KANTOR NEGARA KELAS I TPI MARAJO**

No.	Rencana Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1)	1)	1)	1)
1	Meningkatkan kualitas perencanaan layout dan layout arsitektural di wilayah	1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Arsitektural di Wilayah 2) Indeks Perencanaan Arsitektural di Wilayah	1,20 Indeks 1,10 Indeks

No.	Rencana Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1)	1)	1)	1)
1	Meningkatkan kualitas Dukungan Manpower dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1) Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah	1,10 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manpower	Rp. 4.000.000,00
Dukungan Manpower dan Teknis Lainnya	Rp. 4.000.000,00

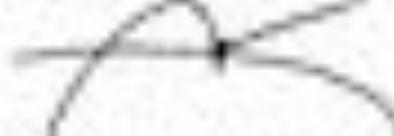
MARAJO, 24 Januari 2023

Rina Karim,  
Kepala Kantor Inspeksi Kelas I TPI Marajo



Marta Marissa Lantoro, S.P., M.A.P.  
NIP. 197004200320001001

Rupa Pratama,  
Kepala Sub-Bagian Tata Usaha



Papa Wijaya, S.H., M.P.,  
NIP. 1962072000119011



**PERJALANAN KEMERUKAN TAHUN 2022  
KEMERUKAN RUMAH SAKITAN PULSA (MILIKI DAN/ATAU  
KAWANCIAN) MELAKSI (100000000)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan tujuan sebagai berikut:

Nama: Tika Widada, S. M. M., S. T.  
Jabatan: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sejarah akan menunjukkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian ini, serta target-realisasi target kinerja yang menunjukkan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kemudahan dan kelengkapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Maret, 10 Januari 2022

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tika Widada, S. M. M., S. T.  
KAWANCIAN MELAKSI (100000000)





**PERJALANAN KEMERIA TELUK BEP  
KEPADA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (KEMERIA  
KANTOR NEGARA KUALA LUMPUR)**

Dalam rangka mewujudkan kerjasama pemerintahan yang efektif, terpadu dan akuntabel serta meningkatkan mutu hasil kerja yang berorientasi dengan standar IS.

Nama : Angra Mahendha Supra Widya, S.H

Jabatan : Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kempraker

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Makhfir Supri Susanto, S.H, M.A.P

Jabatan : Kepala Seksi Inspeksi Kerja I TI/Ministry

Dalam aspek pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama setuju akan melakukan kerja sama yang seluas-luasnya sesuai dengan perjanjian ini, serta setuju menerima kerja sama jangka panjang seperti yang akan ditandatangani dalam dokumen perjanjian. Keterbatasan dan tanggapan perjanjian kerja sama tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan sumbang yang diperlukan serta akan melakukan upaya terbaik untuk kerja dan perjanjian ini dan mengupayakan tindakan yang diperlukan akan kerja selaras perjanjian ini serta

Menjadi 24 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Seksi Inspeksi Kerja I TI/Ministry

Makhfir Supri Susanto, S.H, M.A.P  
NIP. 19620301198001

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan  
Komunikasi Kempraker

Angra Mahendha Supra Widya, S.H  
NIP. 19820401198001

**PERJALANAN RUMBU TAHUN 2023**  
**KEPALA BAKOSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMHORAAN DENGAN**  
**KEPALA KANTOR INFORMASI KELAS I TRIMARAKO**

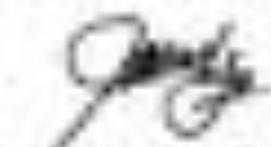
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	1.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi dan Kerja (Kategori 1) 10 Milyar	1. Indeks Kemajuan Akademik di Bidang Literasi (Kategori 1) 10 Milyar 2. Indeks Kemajuan Akademik (Kategori 1) 10 Milyar	1.21 Milyar 1.11 Milyar

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	1.1 Meningkatkan Layanan Keuangan Masyarakat dan Literasi (Kategori 1) 10 Milyar	1. Indeks Kemajuan Literasi (Kategori 1) 10 Milyar	1.11 Milyar

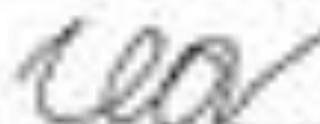
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penguatan Hukum	
Layanan Literasi dan Literasi	Rp. 175.241.000

Marsudi, 04 Januari 2023

Pipa Nalla  
 Kepala Kantor Inspektorat I/TM/Marsudi

  
 Nama: Pipa Nalla, S.H., M.A.P.  
 NIP. 1970081000200010001

Pipa Purnama  
 Kepala Data Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemanager

  
 Nama: Pipa Purnama, S.H., M.A.P.  
 NIP. 1970081000200010001



**PERJALANAN KEMERDEKAAN (PT. IK)  
KEPALA BAKOSURTIAL INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KEMERDEKAAN  
KANTOR INOVASI KELAS I (PRIBADI)**

Dalam rangka melanjutkan perjalanan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta pemerintah yang baik, bersama dengan dibawah ini:

Nama : **Angga Mahendra Raga Wijaya, S.P.**  
Jabatan : **Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemprasan**

berikut akan melanjutkan tugas tugas yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan di, dalam rangka mencapai tugas tugas yang akan menjadi salah satu yang telah ditetapkan dalam rencana pemerintahan.

Kemudahan dan dukungan pemerintah tugas tugas tersebut sudah sudah terdapat dalam kami.

**Bandung, 14 Januari 2021**

**Kepala Balai Teknologi Informasi dan  
Komunikasi Kemprasan**

**Angga Mahendra Raga Wijaya, S.P.**  
NIP. 198203010010000000



**PERJAJARAN KEMERIA TAHUN 2021  
KEPALA BERSI (DI TINGKAT DAN STATUS KEMERIAAN)  
KANTOR NEGARA KELAS I (P) BANARUA**

Dalam rangka mewujudkan kompetensi pemerintahan yang efektif, terapan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bermutu dengan biaya yang efisien.

Nama : Kurniawan Agus Karandjeng  
Jabatan : Kepala Kantor (di Tingkat dan Status Kemeriaan)

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mada Nur Hafid Jumeilha, S.P., M.A.P.  
Jabatan : Kepala Kantor (di Tingkat dan Status Kemeriaan)

Ditulis dalam dua (dua) bahasa selanjutnya disebut Pihak Kedua

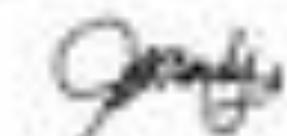
Pihak pertama setuju akan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan semua urusan pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterbatasan dan kemampuan pelaksanaan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kami.

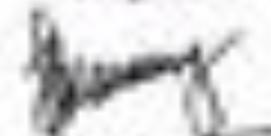
Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pekerjaan ini dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam rangka perbaikan penganggaran dan kerja.

Banarua, 24 Januari 2021

Pihak Kedua  
Kepala Kantor (di Tingkat dan Status Kemeriaan)

Pihak Pertama  
Kepala Kantor (di Tingkat dan Status Kemeriaan)

  
Mada Nur Hafid Jumeilha, S.P., M.A.P.  
NIP. 198203011987011001

  
Kurniawan Agus Karandjeng  
NIP. 198203011987011001

**PERLUASAN KEMEREA TAHUN 2021**  
**KEPALA DESA DAN TUGAL DAN STATUS PEMERIKSAAN DAN/ATAU**  
**KEPALA KANTON MURAH KULAS I (PI NAMA)**

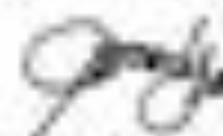
No.	Isu/uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Memperkuat kualitas administrasi legal dan legal compliance di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan di Wilayah 2. Indeks Penguasaan Administrasi di Wilayah	1,20 Indeks 1,00 Indeks

No.	Isu/uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Memperkuat Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis antara di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	1,00 Indeks

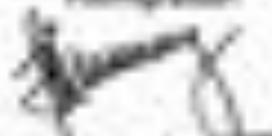
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penguatan Hukum	
Layanan Perizinan dan Tugals	Rp. 190.470.000

Murah, 24 Januari 2021

Wakil Kepala  
 Kepala Kantor Inspeksi Hukum I TPI Murah

  
 Widi Nurhidayah, S.H., M.A.P.  
 NIP. 1970422000621001

Wakil Kepala  
 Kepala Desa dan Tugals dan Status Perizinan

  
 Kurnia Laili Karandera  
 NIP. 1980012199001001



**PERJALANAN KEMERJA TAHUN 2023  
KEPALA BERSI DAN TINGGAL DAN STATUS KEMERJAAN  
KANTOR INSURANSI KELAS I TPI MURADO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada tanggal 01/01/2023:

Nama : **Kusnadi Agus Kusnadi**  
Jabatan : **Kepala Dinkes dan Tingga dan Status Kemerjaan**

berjalan atau mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai ketetapan peraturan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Murado, 01 Januari 2023

**Kusnadi Agus Kusnadi**  
Kepala Dinkes dan Tingga dan Status Kemerjaan

**Kusnadi Agus Kusnadi**  
NIP. 19630201198001001



**PERJALANAN KEMERUL THAMBAH 2023  
KORPRI DESA LULU LINTAS KEMERULAN  
KANTOR MANDIRI KELAS I (TR MANDIRI)**

Untuk rangka mewujudkan kesempatan pemerataan yang adil, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda target dibawah ini.

Nama : Ruddy Junda Pataq  
Jabatan : Kepala Desa Lulu Lintas Kemerulan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Anwar Dji  
Jabatan : Kepala Kantor Program Kelas I (TR Mandiri)

Selaku dalam pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

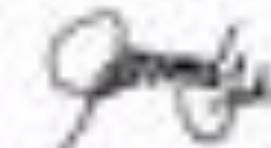
Pihak pertama setuju akan mewujudkan target kinerja yang telah tertera dalam lampiran perjanjian ini. Selain rangka mencapai target kinerja juga memperoleh sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pencapaian target kinerja sesuai target tanggung jawab kami.

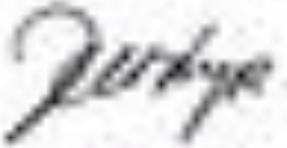
Pihak kedua akan melakukan upaya yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan memperoleh imbalan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan bonus.

Wakau, di Jakarta 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Program Kelas I (TR Mandiri)

Pihak Pertama,  
Kepala Desa Lulu Lintas Kemerulan

  
Muhammad Anwar Dji, S.H., M.A.P.  
NIP. 196303011981011001

  
Ruddy Junda Pataq  
NIP. 196303011981011001

**PERJALANAN KEMERUHAN TAHUN 2022**  
**KEMALU & KEMERUHAN (KEMERUHAN) KEMERUHAN (KEMERUHAN)**  
**KEMERUHAN & KEMERUHAN (KEMERUHAN) (KEMERUHAN)**

No.	Isi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Menyusunnya rencana pelaksanaan kerja dan biaya anggaran di wilayah	1. Indeks Kualitas Masyarakat terhadap Layanan Kemitraan di Wilayah 2. Indeks Perencanaan Kemitraan di Wilayah	1,25 Indeks 1,75 Indeks

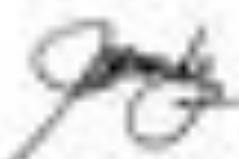
No.	Isi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2	Menyusunnya Laporan Debuhan Manajemen dan Debuhan Teknik Service di Wilayah	1. Indeks Kapasitas Internal di Wilayah	1,50 Indeks

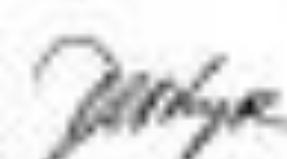
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Perencanaan Hiliris	
Layanan Perantara Debuhan Perencanaan di	Rp. 141.600.000
Perencanaan Kemitraan di Wilayah	Rp. 171.000.000
Perencanaan Kemitraan di Area Non Wilayah	Rp. 47.200.000

Mendaki, 24 Januari 2022

Pihak Kemitra,  
 Kepala Kantor Inspeksi Kemitra (TPI) Mendaki

Pihak Perencana,  
 Kepala Seksi Laku Lintas Kemitra

  
 Mada Hira Hira, S.P., S.A.P.  
 NIP. 19700422000021001

  
 Mada Hira Hira  
 NIP. 19700422000021001



**PERJALANAN KEMERIA TAHUN 2020  
DIPULJ & SERIK LALU LINTAS KEMERIAAN  
KANTOR KEMERIAAN KULIAH I (TKI KEMERIA)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan dengan filosofi ini:

Nama : **Pradya Andika Pradya**

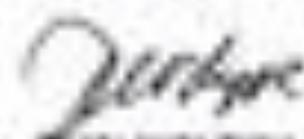
Jabatan : **Kepala Seksi LALU LINTAS KEMERIAAN**

berarti akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan kebijakan ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan.

Keterhasilan dan ketepatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Maujudi, di Jakarta (2020)

Kepala Seksi LALU LINTAS KEMERIAAN

  
**Pradya Andika Pradya**  
NIP. 198004010010001001



**PERJALANAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BERKEMAHENDAH DAN PENINGKATAN KEMERDEKAAN**  
**KANTOR KEMERDEKAAN (TPK MANA)**

Dalam rangka menegakkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Nama : **Quah Damudis S (Dn., M.M)**  
Jabatan : **Kepala Seksi Intelijen dan Perencanaan Strategis**

**Sejarah dan/atau Pribak Pertama**

Nama : **Made Nur Hani Arwatha, S.H., W.A.P**  
Jabatan : **Kepala Seksi Intelijen Publik (TPK Manan)**

**Sejarah dan/atau pribak pertama, Sejarah dan/atau Pribak Kedua**

Pribak pertama (terjadi) akan menunjukkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Realisasi dan kemampuan pencapaian target kinerja tersebut tercapai tercapai sesuai target.

Pribak kedua akan melibatkan sumber yang diperlukan untuk atau melibatkan sumber tenaga kerja yang terdapat di dan mencapai indikator yang diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja.

Manan, 24 Januari 2024

Pribak Kedua  
Kepala Seksi Intelijen Publik (TPK Manan)

Made Nur Hani Arwatha, S.H., W.A.P  
NIP. 19780201198001001

Pribak Pertama  
Kepala Seksi Intelijen dan Perencanaan  
Strategis

Quah Damudis, S (Dn., M.M)  
NIP. 19630101196001001





**PERJALANAN KEMILAH TAHUN 2021  
KEPALA SERVIS INTELLIGENCE DAN PENYUNDAAN PEMERIKSAAN  
KANTOR INSURAN KELAS I TP BARADO**

Dalam rangka mewujudkan transformasi pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama target sebagai berikut:

Nama : **Dudi Darmawan, S. Des., M. M.**  
Jabatan : **Kepala Seksi Intelijen dan Penyelidikan Penyelidikan**

target akan mewujudkan target kinerja yang selaras dengan hasil target perantara ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Substansi dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut terdapat terdapat sebagai berikut:

Melalui 11 Januari 2021  
Kepala Seksi Intelijen dan Penyelidikan  
Kantoran  
  
Dudi Darmawan, S. Des., M. M.  
NIP. 196301011983011001



**PERJALANAN KEMERIA PUSKES (001)  
KEPALA SUB DINAS KEPYAKILAN KEMERIAKES  
KANTOR WILAYAH KOLAG I (01) BUKAR(0)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan mewujudkan

Nama : Yuliana Priska Mulya Wulan, SH  
Jabatan : Kepala Sub-Dinas Keperawatan Keperawatan

**Sebelumnya dijabat Pihak Pertama**

Nama : Gusti Daryanti, S.Sos., SH  
Jabatan : Kepala Sub-Dinas Keperawatan Keperawatan Keperawatan

**Untuk dijabat pihak pertama sebelumnya dijabat Pihak Kedua**

Pihak pertama terdahulu akan melaksanakan tugas khusus yang sebelumnya sudah terdapat perijinan di, dalam rangka mencapai tugas khusus dengan menegakkan disiplin yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kefektifitas dan kegunaan perijinan tugas khusus tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk dapat melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas dan perijinan di dan menegakkan disiplin yang diperlukan dalam rangka penertiban pelaksanaan dan kerja

Bukar, 14 Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Sub-Dinas Keperawatan Keperawatan

  
Gusti Daryanti, S.Sos., SH  
NIP. 1960071199001002

Pihak Pertama  
Kepala Sub-Dinas Keperawatan Keperawatan

  
Yuliana Priska Mulya Wulan, SH  
NIP. 198211020121001

**PERJALANAN KEMERJA TAHUN 2015**  
**KEPALA SUB BIDANG INTELEKSI KEMERJAAN DAN/ATAU**  
**KERALA BIDANG INTELEKSI DAN PENINGKATAN KEMERJAAN**  
**KANTOR BICARA KELAS I TPI SURABAYA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan tugas dan fungsi Kementerian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kementerian di Wilayah 2. Indeks Persepsi Masyarakat Kementerian di Wilayah	1.30 Indeks 1.12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatkan Layanan Pelayanan Masyarakat dan Pelayanan Publik lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah	1.10 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Pergerakan Masyarakat	
Pelaksanaan tugas Kementerian di Wilayah	Rp. 160.000.000
Geser Monev di Wilayah	Rp. 100.000.000
Geser Gabungan di Wilayah	Rp. 40.000.000
Pergerakan Uraan Kerja	Rp. 40.000.000
Pemeliharaan Kementerian di Luar Negeri Angkat	Rp. 60.000.000

Surabaya, 20 Januari 2015

Pihak Penerima  
 Kepala Sub Bidang Intelijen dan Pergerakan  
 Kementerian

  
 Dwi Cahyadi, S.Tw., M.M.  
 NIP. 19620101198001001

Pihak Pengirim  
 Kepala Sub Bidang Intelijen Kementerian

  
 Agus Purwana, S.P.  
 NIP. 196201011980010001



**PERJALANAN KEMERUKAAN TAHUN 2022  
KEPALA SUB DINAS INTELIJEN KESEHATAN  
KANTOR WILAYAH KELAS I TRAWASO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berikhtis sebagai berikut:

Nama : **Yusuf Firdausy Mulya, SpA**  
Jabatan : **Kepala Sub Dinas Intelijen Kesehatan**

Sebagai acuan mewujudkan target kinerja yang berpengaruh untuk tercapainya sasaran ini, maka dengan ini ditetapkan target kinerja yang berpengaruh untuk yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Ketersediaan dan kecapaian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mawati, 14 Januari 2022

Kepala Sub Dinas Intelijen Kesehatan

Yusuf Firdausy Mulya, SpA  
NIP. 19831102012030001



**PERJAJAN KEMERJA TAHUN 2021**  
**KEMAJA SUB SEKTOR PERUMBUHAN, PERUMBUKAN DAN PERIKANAN**  
**KEPALA DAERAH WILAYAH DASAR PERUMBUKAN DAN PERIKANAN**  
**KANTON BANGKAL KELAS I TP BANGKAL**

No.	Sumber Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET
01	01	01	01
1.	Meningkatkan Kualitas pemenuhan tugas dan fungsi komposisi di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Komposisi di Wilayah	1,20 Indeks
		2. Indeks Pengeluaran Komposisi di Wilayah	0,11 Indeks

No.	Sumber Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET
01	01	01	01
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	0,11 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Peningkatan Kualitas	
Penyediaan Tenaga Perekam Komposisi di Wilayah	Rp. 14.500.000
Pelaksanaan Administrasi Komposisi	Rp. 152.500.000

Bangkhal, 24 Januari 2021

Pihak Atas,  
 Kepala Daerah Wilayah dan Perikanan  
 Bangkalan



Guntur Darmawan, S. Des., M. M.  
 NIP. 196301011980021001

Pihak Bawah,  
 Kepala Sub Sektor Perikanan  
 Bangkalan



Imam Chas Fufud  
 NIP. 19820802019121001



**PERJALANAN KEMERIA Tahun 2021  
KEPALA SUB DINAS PENYIARAN DAN KEMERDEKAAN  
(KANTOR WISATA/RELAS/IT/BAKAS)**

Untuk rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sehingga terdapat di bawah ini :

Nama : Tuan Dina Tutah  
Jabatan : Kepala Sub Dinas Penyiaran dan Kemerdekaan

Sebagai akan merupakan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan program ini, serta rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kemudahan dan dukungan pencapaian target kinerja tersebut, sesuai dengan yang telah

Merah, 01 Januari 2021

Kepala Sub Dinas Penyiaran dan Kemerdekaan  
Kemendikbud

Tuan Dina Tutah

NIP. 198308192001121001



**PERJALANAN KEMUDA TAHUN 2022**  
**KEPALA SUB SEKSI PELATIHAN (DUMEN PERJALANAN**  
**KANTOR INSURAN KELAS I TRAWANG)**

Dalam rangka mewujudkan visi-misi perusahaan yang dapat tercapai dan diwujudkan serta berorientasi pada hasil, maka yang beranda target dibawah ini :

Nama : Jody Hani Sudi, SH, MH  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pelatihan Dikawasan Persewaan

**Secukupnya sebagai Pihak Pertama**

Nama : Rendi Jaja Rahaj  
Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Persewaan

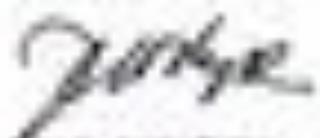
**Secukupnya sebagai Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang ditentukan sesuai timeline perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterbatasan dan kemampuan pencapaian target kinerja tersebut terdapat ringkas ringkas berikut.

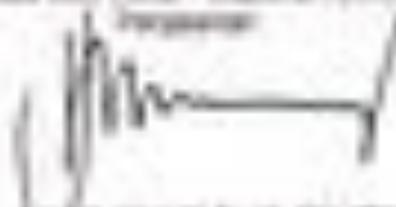
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan melaporkan tindakan yang dilakukan dalam rangka pemantauan pencapaian dan kinerja.

Marsudiqman 2022

**Pihak Kedua**  
Kepala Seksi Lalu Lintas Persewaan

  
Rendi Jaja Rahaj  
NIP. 19820202001001

**Pihak Pertama**  
Kepala Sub Seksi Pelatihan Dikawasan Persewaan

  
Jody Hani Sudi, SH, MH  
NIP. 19620202001001

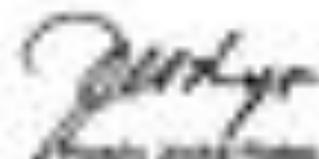
**PERJAJAN KERJA TAHUN 2022**  
**KERALA SUSAH SIKAP PELATIHAN DOMESTIK PERUMAHAN DENGAN**  
**KERALA SUSAH LAJU LINTAS KEMERDEKAAN**  
**KANTOR NEGARA KELAS 1 TP MANADO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di tempat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan di Tempat 2. Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Layanan	1.20 Indeks 1.12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatkan kemampuan Penguasaan Manajemen dan Evaluasi Kinerja secara di tempat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Tempat	1.12 Indeks

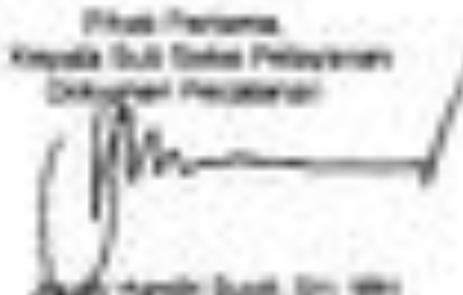
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Persejahteraan Masyarakat	
Layanan Operasional Akurasi Pengukuran II	Rp. 744.642.000
Penelitian/Diseminasi Penelitian II & Uji Layanan Pengukuran	Rp. 23.400.000

Frian Frian  
 Kepala Desa Lata Lintan Kecamatan

  
 NIP. 196007021983031001

Manado, Januari 2022

Frian Frian  
 Kepala Sub Dinas Pelayanan  
 dan Pengukuran

  
 NIP. 196007021983031001



**PERJALANAN KEMERJA TAHUN 2023**  
**KEPADA BUNDA BENEH PELAYANAN DOHUBER PERJALANAN**  
**KANTON MINGKANG-ELANG, TP MANGRO**

Dalam rangka memajukan pelayanan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan  
bertanggung jawab serta berorientasi pada hasil, bersama saya mengundang:

Nama : Jony Hando Supri, SH, MH  
Jabatan : Kepala Sub Balai Pelayanan Dukumen Peradilan

tergantung akan memajukan tingkat kinerja yang efektif serta meningkatkan disiplin diri,  
dan dapat memajukan tingkat kinerja yang meningkat sesuai yang telah ditetapkan dalam  
dokumen perencanaan.

Partisipasi dan inisiatif pemerintah tingkat tinggi sangat penting untuk mencapai tujuan  
ini.

Meningkatkan 2023

Kepala Sub Balai Pelayanan  
Dukumen Peradilan

Jony Hando Supri, SH, MH  
NIP. 19620701198001001



**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUB-BIDANG PEMERIKSAAN KEMAHIRAN**  
**KANTOR BINA BINA KELAS I TPI BANADO**

Dalam rangka meneguhkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berkedudukan sebagai Kepala di

Nama : **Fitri E. S.H**  
Jabatan : **Kepala Sub-Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan**

**Menyampaikan kepada Pihak Pertama**

Nama : **Fitri Jingga Ratih**  
Jabatan : **Kepala Sub-Bidang Latihan Kemasyarakatan**

**Sebagai dasar pihak pertama, sebagai Kepala Bidang Kedua**

Pihak pertama wajib akan meneguhkan target kinerja yang sebagaimana terdapat lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterlaksanaan dan pencapaian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab penuh kami

Pihak kedua akan melakukan upaya yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan meneguhkan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemertoran pencapaian dan kinerja.

**Bananda, Januari 2021**

**Pihak Kedua**  
**Kepala Sub-Bidang Latihan Kemasyarakatan**

**Fitri Jingga Ratih**  
NIP 19810122000410001

**Pihak Pertama**  
**Kepala Sub-Bidang**  
**Pemerintahan Kemasyarakatan**

**Fitri E. S.H**  
NIP 19810122000410001

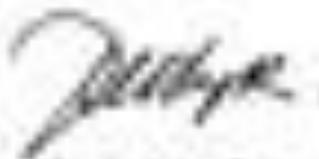
**PERJALAN KEMERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA DESA SEKSU PEMERINTAH KABUPATEN BUKITINGGI**  
**KANTOR DESA LALU LINTAS KEMERJAHAN**  
**KANTON BUNDAH KELUAI TP MUNDO**

No.	Isu/tema Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan/layah dan juga kompetensi di bidang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kemerjahan di Wilayah 2. Indeks Penguasaan Kemerjahan di Wilayah	1.20 Indeks 1.0 Indeks

No.	Isu/tema Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Layanan Pelayanan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah	1.12 Indeks

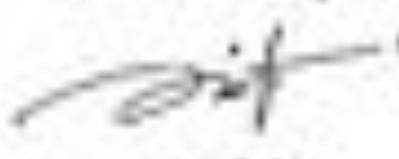
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat	
Pembinaan Kemerjahan di TP	Rp. 100.000.000
Pembinaan Kemerjahan di Desa dan Wilayah	Rp. 100.000.000

Pihak Ketua  
 Kepala Desa Lalu Lintas Kemerjahan

  
 Hedy Jaya Fandy  
 NP 1474720190001001

Bunandjamar 2020

Pihak Sekretaris  
 Kepala Desa Lalu Lintas Kemerjahan

  
 Hedy G. G. H.  
 NP 1474720190001001



**PERJALANAN KEMERJA TAHUN 2023  
KEPALA SUB-BIDAN PEMERIKSAAN KEMERJAAN DENGAN  
KEPALA BIDAN LALU LINTAS PEMERIKSAAN  
KANTOR WILAYAH KELAS I TA. MELAKU**

Untuk dapat melakukan perjalanan pemerintahan yang aman, lancar dan dapat terlaksana serta berkeseluruhan pada hari, bertanda target dibawah ini

Nama : **Fitri E. S.P**

Jabatan : **Kepala Sub Bidan Pemeriksaan Kemerjaan**

Target akan melakukan target kinerja yang diharapkan sesuai dengan proposal TA, serta dapat melakukan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai yang telah ditetapkan dalam struktur pemerintahan.

Kemudahan dan tanggapan pelayanan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Melaku, Januari 2023

Kepala Sub Bidan  
Pemeriksaan Kemerjaan

Fitri E. S.P  
NIP. 198102019900001



**PERJALAN KEMERIA Tahun 2021  
KEPADA DAN DARI UN TERBUKA, KEMENTERIAN  
KANTOR BERKAS KEMAS (UN BERKAS)**

Dalam rangka menajutkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang terbaik, kami yang beranda dengan diwujudkan ini:

Nama : Anisa Juli Marisa, S.P., M.P.  
Jabatan : Kepala Kantor (Kasubid) Tenggulung Kabupaten Karangasem

Sebagai direktur PPKK Pertama

Nama : Rumania Anisa Karandang  
Jabatan : Kepala Kantor (Kasubid) Tenggulung dan Status Kabupaten Karangasem

Sebagai asisten PPKK pertama sebagai direktur PPKK Kedua

PKK pertama beranggotakan pejabat yang berkecenderungan untuk berprestasi dan berprestasi ini dalam rangka menajutkan target kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan daerah. Keberhasilan dan ketepatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PKK kedua akan melakukan upaya yang diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berprestasi ini dan berprestasi terbaik yang diperlukan dalam rangka penajutan pencapaian dan target.

Surabaya, 14 Januari 2021

PKK Kedua  
Kepala Kantor (Kasubid) Tenggulung dan Status  
Kabupaten Karangasem



Rumania Anisa Karandang  
NIP. 196002100010001001

PKK Pertama  
Kepala Kantor (Kasubid) Tenggulung  
Kabupaten Karangasem



Anisa Juli Marisa, S.P., M.P.  
NIP. 196002100010001001

**PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KAPALA SUB DINAS JAWA TIMUR, KEMENTERIAN**  
**PERENCANAAN DAN MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA**  
**KEBUDAYAAN DAN REKREASIKAN (KEMENDIKBUD-PRASARANA)**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di tingkat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Manajemen di Tingkat 2. Indeks Perencanaan Manajemen di Tingkat	1. 100 Indeks 1. 10 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	1. Meningkatkan Layanan Pelayanan Masyarakat dan Pelayanan Teknis tingkat di Tingkat	1. Indeks Kepuasan Internal di Tingkat	1. 10 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penguatan Mutu	
Penelitian dan Triage di Kantor Pusat	Rp. 100.475.000

Maret, 10 Januari 2022

Pihak Ketua  
Kantor Pusat dan Triage dan Pusat  
Kepegawaian



Ruzika Julia Kandung  
NIP. 198001032006020001

Pihak Kepala  
Kantor Sub Dinas dan Triage  
Kepegawaian



Anka Juli Murni, S.H., M.H.  
NIP. 198001032006020001



**PERJULUHAN MANAJEMEN TINGKAT (PM)  
KEPALA DAIRY BINA (PDB) (MUSYAWARAH KEMAHIRAWANAN  
KANTOR BINA DAIRY BINA I TPI MANADO)**

Dalam rangka menjauhkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan jasa bagi masyarakat/terpungku ditinjau di

Nama : **Anda Lani Maris, S.P., M.P.**  
Jabatan : **Kepala Dairy Bina (PDB) Tingkat Manajerial**

terjadi akan menjauhkan tingkat kinerja yang seharusnya sesuai dengan peraturan ini, dalam rangka meningkatkan tingkat kinerja pejabat manajerial sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemerintahan.

Keterhasilan dan tinggapan pencapaian tingkat kinerja tersebut menjadi tanggung jawab diri.

Manado, 19 Januari 2023

Kepala Dairy Bina (PDB) Tingkat  
Manajerial

Anda Lani Maris, S.P., M.P.  
NIP. 196302011990001

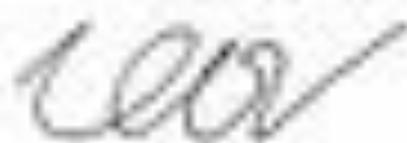
**PERUBAHAN RENCANA TAHUNAN 2021**  
**KEMENTERIAN KOMISI PERENCANAAN NASIONAL (KEMENPAN RI)**  
**KEMENTERIAN KOMISI PERENCANAAN NASIONAL (KEMENPAN RI)**  
**KEMENTERIAN KOMISI PERENCANAAN NASIONAL (KEMENPAN RI)**

No.	Isi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Menyempatkan waktu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian di Melayu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kementerian di Melayu 2. Indeks Persepsi Masyarakat Kementerian di Melayu	1. 70 Indeks 2. 70 Indeks

No.	Isi	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2	Menyempatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknik Jember di Melayu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Melayu	1. 70 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Pengawasan Melayu	
Pengawasan Indeks Fasilitas Indeks Kepuasan, (IKI) (Jember) dan Pengembangan Pengawasan	Rp. 11.000.000
Pembinaan Kelembagaan	Rp. 01.000.000

**Piyan Kusala**  
 Kepala Desk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian



Karya/Wahartha/Supriyotomo, S.T  
 NIP. 196501011983031001

Maret, 4 Januari 2021

**Piyan Permana**  
 Kepala Desk Data Teknologi Informasi Kementerian



Karyo, S.T Pengawasan, ST  
 NIP. 196702201983031001



**PERUSAHAAN PUBLIK TELKOM (PTT)  
KEPALA SUB BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI  
KANTOR NEGARA SELATAN I (TPE MUKAWO)**

Dalam rangka mendukung manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berbagai layanan dibuat di:

nama : Rully Citra Tangkuman, ST  
jabatan : Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pemerintahan

Sebagai alat pendukung layanan kinerja yang selarasnya sesuai layanan pemerintah ini, dalam rangka membantu layanan kinerja warga masyarakat seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterhasilan dan kejayaan pencapaian layanan kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Merah, Januari 2023

Kepala Sub Bidang Teknologi  
Informasi Pemerintahan

Rully Citra Tangkuman, ST  
NIP. 1987032200110021001



**PERUNDING KEMERIA TARIK 2021**  
**KAPALA SUB SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI**  
**KABUPATEN BANGGA (P) (PT BINA (P))**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda dengan dibawah ini :

Nama : Rudy Dwi Tanjungan, ST  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Komunikasi

**Sebelumnya Kepala Pihak Pertama**

Nama : Angra Mahardika Supri Wijaya, S.H  
Jabatan : Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Komunikasi

**Sebelumnya Kepala Pihak Kedua**

Pihak pertama telah dan mewujudkan legal kemitra yang berorientasi untuk seluruh jajaran di dalam rangka mencapai legal kemitra jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pencapaian legal kemitra seluruh tingkat wilayah pada saat ini.

Pihak kedua akan melakukan upaya yang diperlukan untuk akan melakukan kegiatan untuk mencapai kemitra dan pekerjaan ini dan mendapat insentif yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Agustus 2021

**Pihak Kedua**  
Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi dan  
Komunikasi Komunikasi

Angra Mahardika Supri Wijaya, S.H  
NIP. 19640317198221001

**Pihak Pertama**  
Kepala Sub Seksi Teknologi  
Informasi Komunikasi

Rudy Dwi Tanjungan, ST  
NIP. 19670202198221001



**PERJALANAN KEMELAH TAHUN 2021  
KEPALA JURUSAN KEPERAWATAN  
KANTOR MEDIS KELAS I TRI MANADO**

Dalam rangka memajukan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berkecenderungan sebagai berikut:

Nama : Sama Pangemanan, Andi  
Jabatan : Kepala Jurusan Keperawatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fala Wilansa, S.M.M.H., S.H  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

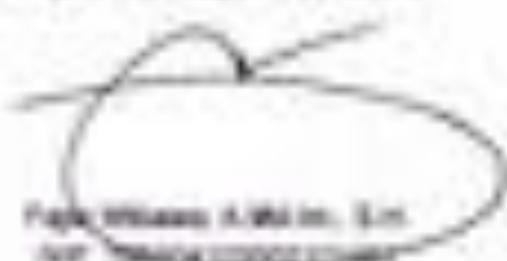
Selaku bagian pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama setuju akan memajukan tingkat kinerja yang selaras dengan semua lingkup pemerintah RI. Dalam rangka memajukan tingkat kinerja hingga mencapai seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterbatasan dan kapasitas pencapaian tingkat kinerja melalui tingkat tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan berdampak RI dan memperoleh indikator yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Januari 2021

Andi Kadi,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Fala Wilansa, S.M.M.H., S.H  
NIP. 196410020020001

Pihak Pertama,  
Kepala Jurusan Keperawatan



Sama Pangemanan, Andi  
NIP. 196110262000012000







**PERJALANAN KEMERU (KEMER) 2021  
KEPALA UPTUSAN LABUK  
KANTOR WILAYAH 021.03 - TAMBORA(S)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berkecenderungan sebagai berikut ini:

Nama : Fauz Purungutan W. Hening, (S)  
Jabatan : Kepala UPTUSAN LABUK

**Sejarah dan Profil Pihak Pertama**

Nama : Faye Effendi A. Nisra, (S)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

**Sejarah dan Profil Pihak Kedua**

Pihak pertama tercapai akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sudah terdapat perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut tercapai tercapai tercapai.

Pihak kedua akan melakukan upaya yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan, penghargaan dan sanksi.

**Wakil Pihak Pertama (S)**

**Faye Effendi A. Nisra,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Faye Effendi A. Nisra, (S)  
NIP. 198304122002121001**

**Wakil Pihak Kedua (S)**

**Fauz Purungutan W. Hening,  
Kepala UPTUSAN LABUK**

**Fauz Purungutan W. Hening, (S)  
NIP. 196302122000041001**

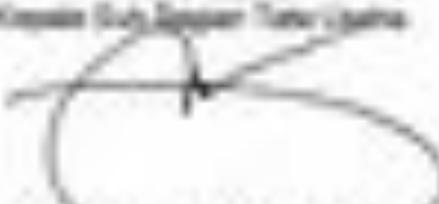
**PERENCANAAN KEMERDIAAN TAHUN 2022**  
**KEPALA LINTAS LUMBU (DINJUKAN KEPALA SUKSES BAGIAN FATA (PANG)**  
**BERIKUT BERLAGI (TIT BERKADO)**

No.	Desain Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi komposisi di Wilayah	1. Indeks Kapasitas Masyarakat terhadap Layanan Komposisi di Wilayah 2. Indeks Penguasaan Komposisi di Wilayah	1. 20 Indeks 2. 11 Indeks

No.	Desain Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknik Internal di Wilayah	1. Indeks Penguasaan Internal di Wilayah	1. 11 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	
Layanan teknis	Rp. 40.000.000
Layanan umum	Rp. 40.000.000
Layanan Dukungan Internal	Rp. 14.000.000

Pius Katus,  
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Pius Katus, S.H., M.M., S.P.,  
 NIP. 196308011983031001

Mardiyaningrum (M2)

Pius Purnama,  
 Kepala Bidang Lintas



Pius Purnama, S.P., M.Si.,  
 NIP. 196308011983031001



**PERJALANAN KEMERU TERAKIM 2021  
KEPALA UNGGULAN UMUM BIDANG KEPALA SUB BIDANG FAKTA UJARAN  
MENDIRI POLAS I PTI BASSAM**

Untuk dapat melanjutkan perjalanan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dibutuhkan orang-orang seperti ini:

Nama : Fauz Purungkarul Hudaing, SH  
Jabatan : Kepala Urusan Umum

Orang-orang akan melanjutkan target kinerja yang sebelumnya sudah tercapai sehingga ini, akan sangat membantu target kinerja jangka menengah maupun yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterampilan dan kemampuan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mendukung 2021

Keputusan 2021

Fauz Purungkarul Hudaing, SH  
NIP. 198202020000000001



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN KEMAHASISWAAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2011  
TENTANG MANAJEMEN KEMAHASISWAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang berwenang dengan kekuasaan ini:

Nama : **Wardah Hafid Husein**  
Jabatan : **Kepala Urusan Keuangan**

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **Fajar Husein, A.Md., S.Pd., S.H.**  
Jabatan : **Kepala Sub Urusan Tata Usaha**

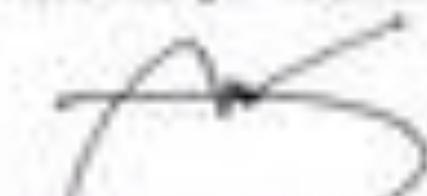
**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**

Pihak pertama (kepada) akan mewujudkan target kinerja yang selaras dengan semua kelompok pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pencapaian target kinerja tersebut meliputi tanggung jawab yaitu:

Pihak kedua akan melakukan upaya yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pekerjaan ini dan mengambatkan tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengurusan dan sarana

**Menandatangani (M)**

**Pihak Kedua,  
Kepala Sub Urusan Tata Usaha**

  
**Fajar Husein, A.Md., S.Pd., S.H.**  
NIP. 196308011981021001

**Pihak Pertama,  
Kepala Urusan Keuangan**

  
**Wardah Hafid Husein**  
NIP. 196403011981021001

**PERJANJIAN KERJA SAMA TAHUN 2011**  
**KEPALA DINAS KEKAWALAN HUKUM NEPALA DAN BUDAYA LAINNYA**  
**KABUPATEN BOGORANG SELATAN (PTK BANGSAP)**

No.	Bentuk Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan legal dan legal informasi di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengurusan di wilayah 2. Indeks Pengawasan Masyarakat di Wilayah	1,20 Indeks 1,10 Indeks

No.	Bentuk Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	1,10 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	
Layanan Perencanaan	Rp. 4.700.000.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 17.000.000
Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 40.000.000

Bogor, 14 Januari 2011

Pihak Kedua,  
Randy Suh Ekapriyato Kepala

  
Randy Suh Ekapriyato, A.Md, Ir., S.H  
NIP. 44020411997030004

Pihak Pertama,  
Kepala Urusan Keuangan

  
Mardiyah Wicandani  
NIP. 4576492001100011



**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG MANAJEMEN RELASI (PM-BAKSI)**

Dalam rangka mendukung manajemen pemerintahan yang efektif, terpadu dan akuntabel serta memberikan pada hasil, lembaga target dibawah ini:

Nama : **Bank Rakyat Indonesia**  
Jabatan : **Ketua Urusan Keuangan**

tersebut akan melaksanakan target kinerja yang sebagaimana terdapat lampiran perjanjian ini. Selain rangka mencapai target kinerja, lembaga tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterhasilan dan kemampuan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mevah, 8 Januari 2021

Ketua Urusan Keuangan

Mervin Mervin  
NIP. 197004032001030004